



**RELASI KUASA DAN KEHENINGAN INSTITUSIONAL:
ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN CNN INDONESIA
DAN KOMPAS.COM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL
DI PONDOK PESANTREN NDHOLO KUSUMO, PATI,
DALAM PERSPEKTIF TEORI KRITIS ANTONIO
GRAMSCI**

**Muhammad Nur Faza¹, Farhan Refas Alfiansyah², Rifma Ghulam
Dzaljad³**

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Indonesia ^{1,2,3}
Email: muhnurfaz@gmail.com¹, refasfarhan@gmail.com²,
rifmaghulam@uhamka.ac.id³

ABSTRACT

This article analyzes sexual violence at Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Central Java, through a framing analysis of two national news reports: CNN Indonesia (9 May 2026) and Kompas.com (29 June 2026), representing the moments of case disclosure and subsequent community backlash against the pesantren's closure. Using Entman's framing model and Critical Discourse Analysis (CDA), both reports are critiqued through Michel Foucault's power/knowledge theory and Antonio Gramsci's concept of hegemony. Findings show kiai authority operates productively in the Foucauldian sense through discipline and normalization, while CNN Indonesia's episodic-personal framing and Kompas.com's counter-narrative centered on parents both reproduce hegemony that protects the status quo. This article argues that institutional silence is neither natural nor resolved once disclosed, but a systemic power mechanism that continually mutates, dismantled only through structural and epistemic reform, including in how media frame such structural violence.

Keywords : *Power relations, institutional silence, framing analysis, Gramscian hegemony, pesantren.*

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, melalui analisis framing atas dua pemberitaan nasional: CNN Indonesia (9 Mei 2026) dan Kompas.com (29 Juni 2026), yang masing-masing merepresentasikan momentum pengungkapan kasus dan reaksi penolakan

komunitas pascapenutupan pesantren. Menggunakan model framing Entman dan pendekatan Analisis Wacana Kritis (CDA), kedua berita dikritisi melalui teori kuasa/pengetahuan Michel Foucault dan konsep hegemoni Antonio Gramsci. Temuan menunjukkan kekuasaan kiai beroperasi produktif secara Foucauldian melalui disiplin dan normalisasi, sementara framing CNN Indonesia yang episodik-personal dan framing Kompas.com yang menonjolkan narasi tandingan wali santri sama-sama mereproduksi hegemoni yang melindungi status quo. Artikel ini berargumen bahwa keheningan institusional bukan kondisi alami maupun selesai setelah kasus terungkap, melainkan mekanisme kekuasaan sistemik yang terus bermutasi, dan hanya dapat diputus melalui reformasi struktural, epistemis, serta perubahan cara media membingkai kekerasan struktural semacam ini.

Kata Kunci : *Relasi kuasa, keheningan institusional, analisis framing, hegemoni Gramsci, pesantren.*

PENDAHULUAN

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah berkontribusi besar dalam pembentukan identitas keagamaan bangsa selama berabad-abad, kini menghadapi ujian berat berupa terungkapnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh figur-figur otoritatif terhadap santri. Kasus Pondok Pesantren Ndholo Kusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, merupakan salah satu manifestasi nyata dari fenomena sistemik yang tidak dapat lagi diabaikan. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan—meningkat 50 persen dari tahun sebelumnya (Catahu, 2022). Di antara jumlah tersebut, kekerasan seksual di lingkungan lembaga pendidikan termasuk pesantren kerap tidak dilaporkan karena berbagai hambatan struktural dan kultural yang melingkupinya. Indonesia sendiri diakui sebagai masyarakat patriarki, di mana laki-laki memegang kekuasaan dan perempuan dipandang sebagai pihak yang perlu dikontrol (Harkrisnowo, 2003).

Fenomena kekerasan seksual di pesantren memperlihatkan pola yang berulang dan sistemik: pelaku umumnya adalah kiai atau pengasuh dengan otoritas religius yang tak terbantahkan; korban adalah santri yang terjebak dalam relasi ketergantungan total; dan komunitas sekitar cenderung membungkam kejadian demi menjaga nama baik institusi. Pola ini menunjukkan bahwa kekerasan tersebut bukan sekadar persoalan individu menyimpang, melainkan merupakan produk dari struktur kekuasaan yang sistemik dan patologis (Andini et al., 2022).

Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, diperlukan kerangka analisis yang mampu membedah dimensi kekuasaan, ideologi, dan konsensus sosial

yang bekerja di balik keheningan institusional tersebut. Berbagai pendekatan kekuasaan dalam ilmu sosial – misalnya teori kuasa/pengetahuan Michel Foucault yang menekankan aspek produktif kekuasaan melalui wacana dan disiplin – dapat memberi pijakan awal untuk memahami fenomena ini. Namun, pendekatan tersebut relatif terbatas dalam menjelaskan mengapa korban, komunitas, bahkan pihak-pihak di luar pelaku turut serta secara aktif (bukan sekadar tunduk secara pasif) dalam melanggengkan kebisuan institusional. Untuk itu, penelitian ini memilih konsep hegemoni Antonio Gramsci sebagai kerangka analisis utama, karena Gramsci secara spesifik menjelaskan bagaimana dominasi kelompok tertentu dipertahankan bukan semata lewat paksaan, melainkan terutama melalui kepemimpinan moral-intelektual yang berhasil memenangkan persetujuan (consent) dari pihak yang dikuasai, sehingga struktur ketimpangan tersebut mengkristal dan dianggap alamiah dalam institusi-institusi sosial (Gramsci, 1971).

Kerangka Gramsci ini relevan untuk membedah tiga hal sekaligus dalam kasus Pondok Pesantren Ndholo Kusumo: bagaimana kekuasaan kiai dibangun di atas kombinasi dominasi dan konsensus; bagaimana aparat masyarakat sipil di sekitar pesantren (pengurus, ustadz, alumni, struktur kekeluargaan) berperan memproduksi konsensus tersebut; dan bagaimana wacana keagamaan dinaturalisasi menjadi "akal sehat" (common sense) yang melindungi status quo kekuasaan sekaligus membungkam korban.

Tinjauan Literatur

Teori hegemoni Antonio Gramsci (1971) merupakan salah satu kontribusi terpenting dalam tradisi teori kritis abad ke-20. Gramsci mengembangkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelompok dominan mempertahankan kekuasaannya bukan semata melalui kekerasan dan pemaksaan, melainkan terutama melalui persetujuan (consent) yang diorganisasi secara kultural dan ideologis. Hegemoni bekerja ketika nilai-nilai, norma, dan pandangan dunia kelompok dominan diterima sebagai 'akal sehat' (common sense) oleh kelompok-kelompok yang didominasi, sehingga dominasi tersebut tampak natural dan tak terbantahkan (Merli, 2010).

Dalam konteks institusi pesantren, hegemoni kiai dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi sosial yang berlapis. Secara historis, figur kiai di Indonesia memiliki status sebagai wali (orang suci), guru (pendidik), dan pemimpin komunitas sekaligus. Posisi multidimensional ini menciptakan apa yang Bourdieu (1990) sebut sebagai 'modal simbolik' – kekuasaan yang diakui dan dilegitimasi secara sosial tanpa perlu selalu dipertanyakan (Burawoy, 2008). Ketaatan santri kepada kiai dalam tradisi pesantren acapkali dilandasi doktrin teologis yang menyatakan bahwa kepatuhan kepada guru merupakan syarat keberkahan ilmu (Shiddiq, 2015).

Kajian tentang kekerasan seksual dalam institusi keagamaan menunjukkan pola yang berulang lintas budaya dan agama. (Terry, 2008), dalam studinya tentang

kekerasan seksual yang dilakukan klerus Katolik di Amerika Serikat, menemukan bahwa faktor-faktor struktural seperti hierarki institusional yang kaku, budaya kerahasiaan, dan loyalitas kepada institusi di atas segalanya, merupakan prasyarat yang memungkinkan kekerasan berlangsung lama tanpa terungkap. Temuan serupa dikemukakan oleh (Olofsson et al., 2020) yang menyimpulkan bahwa isolasi fisik dan psikologis korban dalam institusi residensial keagamaan merupakan salah satu faktor risiko terbesar. Di Indonesia, sejumlah peneliti telah mendokumentasikan fenomena kekerasan di pesantren meski dengan pendekatan yang beragam. (Haoxing & System, n.d.) menggambarkan transformasi pesantren modern yang membawa perubahan struktural namun belum tentu mendisrupsi relasi kuasa tradisional. Sementara itu, Komnas Perempuan (2021) mencatat bahwa institusi pendidikan berbasis agama, termasuk pesantren, menjadi salah satu lokus utama kekerasan seksual berbasis gender di Indonesia, dengan karakteristik khusus berupa rendahnya angka pelaporan akibat faktor-faktor kultural dan struktural.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). CDA, sebagaimana dikembangkan oleh Fairclough (1992), adalah metodologi yang secara eksplisit mengakui dimensi politis dari bahasa dan wacana—bahwa cara sesuatu dibicarakan atau tidak dibicarakan bukan merupakan cerminan netral dari realitas, melainkan merupakan situs di mana kekuasaan diproduksi, dipertahankan, dan ditantang. Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya mengintegrasikan analisis linguistik dengan analisis sosial yang menghubungkan praktik diskursif dengan struktur kekuasaan yang lebih luas (Cap, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (1) dokumen resmi berupa laporan Komnas Perempuan dan berita acara terkait kasus kekerasan seksual di pesantren; (2) pemberitaan media massa daring yang meliput kasus Pondok Pesantren Ndholo Kusumo; (3) literatur akademis primer dan sekunder tentang sosiologi pesantren, teori kritis, dan studi kekerasan berbasis gender; serta (4) peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis konten teks, baik itu berupa artikel, berita, laporan kasus, atau dokumen lainnya.

Metode analisis dilakukan dalam tiga tahap yang saling terkait. Tahap pertama adalah analisis tekstual, yakni memeriksa bagaimana kasus tersebut direpresentasikan dalam berbagai teks dari pernyataan resmi institusi hingga pemberitaan media. Tahap kedua adalah analisis diskursif, yakni mengidentifikasi wacana-wacana dominan yang membentuk pemahaman publik tentang kasus.

Tahap ketiga adalah analisis sosial, yakni menghubungkan temuan diskursif dengan struktur kekuasaan dan hegemoni sebagaimana dijelaskan oleh kerangka Foucault dan Gramsci. Melalui metode ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola-pola yang muncul dalam relasi kuasa di lingkungan pesantren (Habibie, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Dan Temuan

Pondok Pesantren Ndholo Kusumo berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan merupakan salah satu pesantren yang cukup dikenal di wilayah tersebut. Kasus kekerasan seksual yang melibatkan pengasuh pesantren ini mulai terungkap setelah beberapa santri memberanikan diri untuk bercerita kepada pihak luar—suatu tindakan yang dalam konteks budaya pesantren memerlukan keberanian yang tidak kecil. Laporan awal yang masuk ke aparat kepolisian mengungkap dugaan kekerasan seksual yang dilakukan secara sistematis oleh pihak yang memiliki otoritas tertinggi di pesantren tersebut.

Data dari Komnas Perempuan (CATAHU 2022) menunjukkan bahwa lembaga pendidikan, termasuk pesantren, merupakan salah satu lokus kekerasan seksual yang signifikan di Indonesia. Dari total 338.496 kasus kekerasan berbasis gender yang tercatat pada tahun 2021, proporsi yang terjadi dalam setting institusional keagamaan menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Angka ini diyakini masih jauh di bawah realita sesungguhnya mengingat tingginya dark number—kasus yang tidak dilaporkan—dalam lingkungan seperti pesantren. Analisis terhadap pemberitaan media tentang kasus Ndholo Kusumo mengungkap beberapa pola diskursif yang signifikan. Pertama, narasi awal yang muncul dalam pemberitaan cenderung memposisikan kasus ini sebagai 'masalah oknum' atau 'pengkhianatan kepercayaan', bukan sebagai produk dari struktur institusional yang bermasalah. Framing semacam ini secara tidak langsung melindungi institusi pesantren dari kritik yang lebih sistemik. Kedua, terdapat upaya-upaya dari pihak tertentu untuk mendiskreditkan korban atau mempertanyakan kredibilitas kesaksian mereka—sebuah pola yang oleh para ahli disebut sebagai victim blaming dan merupakan mekanisme hegemoni yang efektif dalam membungkam suara korban.

Dari sisi respons institusional, data menunjukkan adanya jeda waktu yang signifikan antara terjadinya kekerasan, pelaporan pertama, dan tindakan hukum yang konkret. Respons komunitas pesantren pun tidak langsung berpihak kepada korban—sebaliknya, terdapat tekanan sosial yang kuat agar persoalan diselesaikan secara internal tanpa 'mencoreng nama baik' pesantren. Pola ini mencerminkan apa yang oleh (Morrison & Milliken, 2000) disebut sebagai organizational silence—kecenderungan sistemik untuk menekan informasi yang mengancam citra dan

stabilitas institusi.

Deskripsi Objek Berita

Penelitian ini menetapkan dua berita sebagai unit analisis framing, yaitu CNN Indonesia dengan judul "*Fakta-fakta Kasus Pelecehan Santriwati di Ponpes Pati*" yang tayang pada 9 Mei 2026, dan Kompas.com dengan judul "*Wali Santri Geruduk Kemenag Pati, Tolak Penutupan Ponpes Ndholo Kusumo*" yang tayang pada 29 Juni 2026. Pemilihan kedua berita ini bukan tanpa alasan metodologis: keduanya memberitakan objek peristiwa yang identik, yakni kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, namun pada dua momentum yang berbeda dalam siklus hidup pemberitaan kasus tersebut. CNN Indonesia menangkap momentum pengungkapan, ketika negara melalui aparat kepolisian dan Kementerian Agama menindak kasus tersebut secara terbuka. Kompas.com menangkap momentum sesudahnya, ketika sebagian komunitas pesantren justru bereaksi menolak konsekuensi dari penindakan itu. Rentang waktu hampir dua bulan antara kedua berita memberi ruang bagi penelitian ini untuk membaca bukan sekadar potret tunggal peristiwa, melainkan **dinamika** framing yang bergerak seiring waktu dan seiring pergeseran aktor yang diberi ruang bersuara dalam teks berita.

Framing CNN Indonesia: Momentum Pengungkapan yang Terjebak Individualisasi



Ketika dibaca melalui empat fungsi framing Entman, berita CNN Indonesia menampilkan pola yang khas dari liputan kejahatan berskala individual. Pendefinisian masalah dalam berita ini secara konsisten berputar pada figur tunggal, yakni tersangka berinisial AS, dengan pelabelan yang tegas seperti "kiai cabul", "predator seksual", dan yang paling menonjol, kata "oknum". Pemilihan kata "oknum" ini sesungguhnya bukan pilihan diksi yang netral; ia membawa konsekuensi framing yang mendalam karena secara implisit menegaskan bahwa institusi pesantren pada dasarnya baik dan sehat, sementara persoalan hanya muncul dari individu yang menyimpang di dalamnya. Konsekuensinya, pembaca diarahkan untuk memahami kasus ini sebagai kegagalan moral seseorang, bukan sebagai produk dari struktur kuasa yang memungkinkan penyimpangan tersebut berlangsung lama tanpa terdeteksi.

Pada level diagnosis penyebab, berita ini sesungguhnya sudah mulai menyentuh dimensi struktural – disebutkan bahwa relasi kuasa antara kiai dan santri, lingkungan pesantren yang tertutup, serta kerentanan ekonomi korban yang mayoritas berasal dari keluarga tidak mampu dan yatim piatu, menjadi faktor yang memungkinkan korban bertahun-tahun tidak berani bersuara. Namun, faktor-faktor struktural ini ditempatkan sebagai elemen pendukung kronologi kasus, bukan sebagai inti argumen berita. Media tidak mengembangkan lebih jauh pertanyaan mengapa struktur semacam itu bisa terbentuk dan bertahan, sehingga dimensi struktural yang sudah tersirat tetap berada di pinggiran narasi, kalah menonjol dibanding detail personal pelaku dan kronologi penangkapannya.

Evaluasi moral dalam berita ini sangat tegas berpihak pada korban. Detail bahwa korban adalah anak-anak berusia setingkat kelas satu dan dua SMP, berasal dari keluarga miskin dan yatim piatu yang menggantungkan pendidikan pada ponpes tersebut secara gratis, serta klaim tersangka yang menyebut dirinya sebagai keturunan nabi untuk melegitimasi perbuatannya, semuanya berfungsi membangun indignasi kolektif pembaca. Sejalan dengan konsep episodic framing yang dikemukakan Iyengar, pengadilan moral pada berita ini bekerja secara personal dan emosional, memusatkan kemarahan pada sosok pelaku tunggal, bukan pada kritik terhadap sistem pendidikan keagamaan nonformal yang minim mekanisme akuntabilitas secara lebih luas.

Rekomendasi penyelesaian yang ditonjolkan pun sejalan dengan pola tersebut, yaitu solusi administratif-legal berupa penutupan ponpes oleh Kementerian Agama, pemindahan santri ke lembaga pendidikan lain, dan proses hukum terhadap tersangka. Solusi yang bersifat struktural, seperti reformasi sistem pengawasan pesantren secara nasional atau audit relasi kuasa keagamaan di seluruh Indonesia, tidak muncul sebagai bingkai utama pada tahap pemberitaan ini – ia baru hadir belakangan lewat suara akademisi, dan itu pun sebagai elemen tambahan, bukan kerangka utama liputan.

Framing Kompas.com: Pergeseran Subjek dari Korban ke Komunitas yang Merasa Dirugikan



Berbeda dari CNN Indonesia, Kompas.com menampilkan pergeseran framing

yang cukup drastis meski melaporkan konsekuensi dari peristiwa yang sama. Pendefinisian masalah pada berita ini tidak lagi berpusat pada kekerasan seksual itu sendiri, melainkan pada dampak administratif penutupan ponpes terhadap pendidikan dan masa depan santri. Subjek utama berita bergeser dari korban kekerasan seksual menjadi wali santri yang merasa dirugikan oleh keputusan Kementerian Agama, sehingga secara struktural, berita ini menempatkan kelompok yang menolak penutupan sebagai pihak yang paling banyak diberi ruang bersuara.

Diagnosis penyebab dalam berita ini pun bergeser jauh dari struktur kuasa keagamaan yang menjadi akar masalah kekerasan. Penyebab yang ditonjolkan justru adalah kebijakan Kementerian Agama yang dinilai sebagian wali santri "berlebihan", bahkan muncul narasi kausal alternatif berupa dugaan adanya persaingan bisnis antarpesantren di balik pencabutan izin operasional tersebut. Kemunculan narasi alternatif semacam ini penting dicermati karena ia secara implisit mengalihkan atensi pembaca dari pertanyaan tentang perlindungan anak menuju pertanyaan tentang motif ekonomi pihak-pihak yang dianggap diuntungkan oleh penutupan itu.

Evaluasi moral pada berita ini pun menjadi ambigu, bahkan cenderung berat sebelah ke arah pemulihan citra institusi. Kutipan-kutipan wali santri, seperti pernyataan bahwa selama enam tahun anaknya berada di lingkungan pesantren tersebut tidak pernah mengeluhkan hal-hal aneh, atau testimoni bahwa kemampuan mengaji dan hafalan anak justru menurun setelah dipindahkan dari ponpes, berfungsi meredam urgensi kasus yang menjadi dasar penutupan. Penting dicatat bahwa berita ini tidak secara eksplisit menyangkal terjadinya kekerasan seksual tersebut, namun struktur pemberian ruang suara yang timpang – di mana wali santri yang menolak penutupan mendapat ruang dominan, sementara korban atau pendamping hukum korban tidak hadir dengan bobot yang setara dalam artikel yang sama – menghasilkan efek framing yang secara halus melunturkan legitimasi posisi korban.

Rekomendasi penyelesaian yang ditonjolkan pada berita ini pun konsisten dengan pergeseran tersebut, yaitu pemulihan izin operasional pesantren dan penyelesaian melalui audiensi atau mediasi dengan Kementerian Agama, bukan penguatan proses hukum terhadap pelaku atau pemulihan psikologis dan sosial bagi korban.

Membaca Dua Berita sebagai Satu Kesatuan Proses Framing

Ketika dibaca berdampingan, kedua berita ini sesungguhnya bukan dua potongan informasi yang berdiri sendiri, melainkan dua tahap dari satu proses framing yang bergerak. CNN Indonesia merepresentasikan tahap ketika suara korban berhasil menembus dan memaksa institusi negara bertindak; Kompas.com merepresentasikan tahap sesudahnya, ketika kelompok yang merasa dirugikan oleh tindakan negara tersebut mulai membangun kembali narasi yang menguntungkan

posisi mereka. Pergeseran ini penting karena ia menunjukkan bahwa proses framing media terhadap kasus kekerasan struktural tidak berhenti pada satu titik waktu, melainkan terus bergerak dan dapat berbalik arah tergantung pada aktor mana yang berhasil merebut ruang bersuara pada momentum tertentu.

Kritik Teori Kritis Antonio Gramsci

Pembacaan framing di atas, jika berhenti pada level deskriptif semata, hanya akan menghasilkan potret jurnalistik tentang bagaimana dua media membingkai satu peristiwa secara berbeda. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara memadai, temuan framing tersebut perlu dibaca lebih jauh melalui kerangka hegemoni Antonio Gramsci, sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori penelitian ini.

Rumusan masalah pertama mempertanyakan bagaimana relasi kuasa antara kiai dan santri di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo terstruktur dan dilanggengkan melalui mekanisme yang tidak semata koersif, melainkan juga konsensual. Temuan framing pada CNN Indonesia justru menunjukkan bahwa media arus utama, pada tahap awal pemberitaan, belum mampu atau belum berupaya membongkar dimensi konsensual ini. Dengan memusatkan cerita pada figur tersangka sebagai oknum menyimpang, berita ini secara tidak sengaja menegaskan bahwa persoalan berhenti pada individu, padahal justru dimensi konsensual itulah yang menjadi jawaban paling mendasar atas rumusan masalah pertama. Bagi Gramsci, kekuasaan kelompok dominan paling efektif bertahan bukan karena ia dipaksakan secara terbuka, melainkan karena ia telah berhasil memenangkan persetujuan pihak yang didominasi, sedemikian rupa sehingga relasi kuasa tersebut tidak lagi tampil sebagai relasi kuasa, melainkan sebagai kewajiban spiritual yang wajar dan bahkan sakral. Doktrin bahwa santri harus tunduk sepenuhnya pada kiai demi memperoleh keberkahan ilmu adalah bentuk konkret dari mekanisme ini, dan posisi kiai sebagai figur yang menyandang secara simultan status wali, guru, sekaligus pemimpin komunitas sebagaimana dijelaskan melalui konsep modal simbolik Bourdieu yang telah dirujuk pada tinjauan literatur membuat otoritas tersebut diakui secara sosial tanpa perlu dipertanyakan. Framing media yang berhenti pada level oknum individual, dengan demikian, turut mereproduksi ketidaktampakan relasi kuasa ini alih-alih membongkarnya kepada publik.

Rumusan masalah kedua mempertanyakan mekanisme apa saja yang menciptakan dan mempertahankan keheningan institusional yang menghalangi korban melapor dan komunitas merespons. Jika kedua berita dibaca sebagai satu rangkaian, tampak bahwa keheningan institusional bukanlah kondisi yang statis, melainkan proses yang bermutasi bentuknya seiring waktu. Pada tahap yang direkam CNN Indonesia, keheningan itu tampak retak dan pecah – jeda hampir dua tahun antara laporan pertama pada September 2024 dan penetapan tersangka pada Mei 2026 menjadi bukti nyata bahwa suara korban sempat gagal menembus

tatanan hegemonik yang berlaku, baik di dalam komunitas pesantren maupun di level birokrasi keagamaan, hingga akhirnya keberanian korban yang telah lulus dan tekanan publik memaksa proses hukum bergerak. Namun pada tahap yang direkam Kompas.com, keheningan tersebut tidak serta-merta berakhir; ia justru berubah bentuk. Alih-alih membisu sepenuhnya, sebagian komunitas pesantren kini tampil aktif memproduksi narasi tandingan – mulai dari testimoni yang meragukan kebenaran tuduhan, dugaan motif ekonomi di balik penutupan, hingga penilaian bahwa keputusan Kementerian Agama terlalu berlebihan. Pergeseran dari kebisuan pasif menjadi bantahan aktif ini adalah wujud konkret dari apa yang Gramsci sebut sebagai *war of position*, yaitu pertarungan hegemoni yang berlangsung secara bertahap melalui penguasaan ruang wacana di masyarakat sipil, bukan melalui konfrontasi terbuka yang bersifat sekali jadi. Temuan ini juga sejalan dengan konsep *organizational silence* yang dikemukakan Morrison dan Milliken, yang menekankan bahwa institusi cenderung menekan informasi yang mengancam citra dan stabilitasnya – hanya saja dalam kasus ini, penekanan tersebut berlanjut bahkan setelah informasi itu bocor ke ruang publik, dalam bentuk yang lebih halus.

Rumusan masalah ketiga mempertanyakan bagaimana wacana keagamaan dan kultural dimanfaatkan untuk mereproduksi hegemoni yang melindungi pelaku dan mendiskreditkan korban. Testimoni wali santri dalam Kompas.com memberi jawaban yang cukup jelas atas pertanyaan ini. Ketika seorang wali santri menyatakan bahwa hafalan mengaji anaknya menurun sejak dipindahkan dari Ndholo Kusumo, dan bahwa anak tersebut kini lebih sering bermain ponsel dan sulit diajak mengaji, pernyataan ini menempatkan capaian religius sebagai tolok ukur utama untuk menilai baik-buruknya sebuah institusi pendidikan. Konsekuensinya, capaian religius tersebut secara implisit dijadikan alasan untuk meragukan urgensi kasus kekerasan seksual yang justru menjadi dasar penutupan ponpes tersebut. Pola wacana semacam ini adalah contoh nyata dari apa yang Gramsci sebut sebagai *senso comune*, yaitu cara pandang yang terasa alamiah dan tidak lagi dipertanyakan kebenarannya, padahal sesungguhnya merupakan hasil konstruksi ideologis. Common sense yang terbentuk di sini – bahwa pondok pesantren yang baik adalah pondok yang berhasil mencetak anak fasih mengaji – secara efektif mengalihkan kriteria penilaian sebuah institusi pendidikan dari soal keselamatan dan perlindungan anak menjadi semata soal capaian keagamaan. Yang membuat mekanisme ini demikian kuat adalah kenyataan bahwa ia tidak perlu dipaksakan oleh pihak berkuasa; ia justru disampaikan secara tulus dan penuh kekhawatiran oleh orang tua yang, sebagaimana dijelaskan pada bagian subalternitas korban di naskah ini, juga berada dalam posisi subaltern secara ekonomi karena bergantung pada pendidikan gratis. Dengan demikian, wacana yang melindungi status quo kekuasaan ini justru diproduksi ulang oleh pihak yang sesungguhnya dirugikan oleh struktur yang sama, sebuah paradoks yang menjadi

inti dari konsep hegemoni Gramsci itu sendiri: dominasi yang paling bertahan lama adalah dominasi yang berhasil membuat pihak yang didominasi turut mempertahankannya.

Ketiga jawaban di atas, jika dirangkai, menegaskan bahwa fenomena kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo tidak dapat dipahami secara memadai hanya sebagai patologi individual seorang pengasuh pesantren, sebagaimana secara implisit dibingkai oleh CNN Indonesia pada tahap awal pemberitaan, maupun sebagai persoalan administratif semata terkait penutupan lembaga pendidikan, sebagaimana dibingkai Kompas.com pada tahap berikutnya. Fenomena ini adalah produk dari blok kekuasaan yang bekerja lewat kombinasi dominasi dan konsensus, dipertahankan oleh aparatus masyarakat sipil di sekitar pesantren, dan dilegitimasi oleh wacana keagamaan yang telah dinaturalisasi menjadi common sense dan seluruh mekanisme tersebut terus beroperasi bahkan setelah kasusnya terbongkar ke publik, hanya dengan wajah yang berbeda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menggunakan analisis framing atas dua pemberitaan – CNN Indonesia ("*Fakta-fakta Kasus Pelecehan Santriwati di Ponpes Pati*", 9 Mei 2026) dan Kompas.com ("*Wali Santri Geruduk Kemenag Pati, Tolak Penutupan Ponpes Ndholo Kusumo*", 29 Juni 2026) yang kemudian dikritisi melalui perspektif teori kritis Foucault dan Gramsci untuk menganalisis fenomena relasi kuasa dan keheningan institusional yang melingkupi kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndholo Kusumo, Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Dalam konteks teori kuasa/pengetahuan Foucault, dapat dilihat bahwa kekuasaan kiai beroperasi secara produktif melalui mekanisme disiplin dan normalisasi yang menghasilkan subjek-subjek yang patuh dan tidak berdaya untuk melawan. Teknologi disiplin pesantren dan kondisi panoptisisme yang tercipta dari struktur fisiknya membentuk santri menjadi individu yang menginternalisasi kepatuhan sebagai nilai spiritual, sehingga mereka bahkan tidak mampu mengenali kekerasan yang dialami sebagai kejahatan. Framing CNN Indonesia yang memusatkan kasus ini pada figur "oknum" individual secara tidak sengaja memperlihatkan sisi lain dari mekanisme disiplin tersebut: media arus utama pun turut memandang persoalan ini sebagai penyimpangan personal, bukan sebagai hasil kerja teknologi kekuasaan yang sistemik di dalam institusi pesantren.

Dari perspektif hegemoni Gramsci, penelitian ini menunjukkan bahwa keheningan komunitas pesantren dalam merespons kekerasan seksual bukanlah keheningan yang alami ia adalah produk dari blok historis yang secara terkoordinasi melindungi otoritas kiai melalui konsensus ideologis, relasi patron-klien, dan wacana perlindungan institusi. Analisis atas kedua berita memperlihatkan bahwa keheningan ini bergerak dalam dua babak yang berbeda: pada tahap yang

direkam CNN Indonesia, keheningan tampak retak ketika laporan yang tertahan sejak September 2024 akhirnya menembus ruang publik dan memaksa negara bertindak; namun pada tahap yang direkam Kompas.com, keheningan itu bermutasi menjadi bentuk yang lebih halus, yakni narasi tandingan dari sebagian wali santri yang meragukan urgensi kasus, mempertanyakan keputusan penutupan, bahkan menghadirkan dugaan motif ekonomi di balik pencabutan izin operasional. Pergeseran ini adalah wujud konkret dari *war of position* pertarungan hegemoni yang tidak berhenti pada momentum pengungkapan kasus, melainkan terus berlanjut sebagai perebutan ruang wacana di masyarakat sipil. Testimoni bahwa capaian mengaji anak menurun sejak dipindahkan dari Ndholo Kusumo juga memperlihatkan bagaimana wacana keagamaan dinaturalisasi menjadi *senso comune* yang mengalihkan kriteria penilaian institusi dari soal keselamatan anak menjadi semata soal capaian religius sebuah common sense yang, secara ironis, direproduksi oleh kelompok yang sesungguhnya juga berada dalam posisi subaltern secara ekonomi.

Ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan, termasuk anak di bawah umur, tetap menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan karena diperkuat oleh budaya patriarki yang telah tertanam dalam pranata sosial dan keagamaan (Catahu, 2022). Temuan dari dua media ini menegaskan bahwa pers turut menjadi arena tempat hegemoni dipertahankan maupun dipertentangkan: framing episodik-personal yang dominan pada pemberitaan awal efektif membangun kemarahan publik dan mendorong tindakan hukum cepat, namun berisiko mereproduksi hegemoni yang sama dengan memusatkan cerita pada "oknum" ketimbang struktur; sementara framing pascakasus yang memberi ruang dominan pada narasi penolakan tanpa menyandingkannya secara setara dengan suara korban berisiko melunturkan legitimasi korban yang sudah susah payah diperoleh. Oleh karena itu, pentingnya melindungi hak-hak individu, termasuk hak perempuan dan anak-anak untuk bebas dari kekerasan, menuntut reformasi struktural yang bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga epistemis dan kultural – termasuk reformasi pada cara media membingkai kasus-kasus kekerasan struktural semacam ini sejak tahap pertama pemberitaan hingga tahap pascapenindakan.

Secara keseluruhan, perspektif teori kritis mendorong upaya untuk mengatasi ketidakadilan struktural dan menciptakan institusi yang adil dan aman bagi semua individu. Komunitas pesantren yang berkomitmen pada nilai-nilai Islam yang autentik tentang keadilan dan perlindungan bagi yang lemah memiliki sumber daya moral dan epistemis yang besar untuk memimpin transformasi ini. Diperlukan keberanian untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang telah lama dianggap sakral, solidaritas dengan korban yang melampaui loyalitas institusional maupun tekanan komunitas untuk kembali pada status quo, serta komitmen nyata baik dari institusi keagamaan maupun dari media massa sebagai bagian dari masyarakat sipil

terhadap reformasi struktural yang sungguh-sungguh berpihak pada keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Burawoy, M. (2008). III: Cultural Domination: Gramsci Meets Bourdieu. *Conversations with Pierre Bourdieu*, 34. <http://burawoy.berkeley.edu/Bourdieu.htm>
- Cap, P. (2018). Critical discourse analysis. *Methods in Pragmatics*, 425–451. <https://doi.org/10.1515/9783110424928-017>
- 2005–2003. (8.5.2017), *הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים*, הארץ Title16, No (2022). Emilio.
- Habibie, D. K. (2018). Dwi Fungsi Media Massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79. <https://doi.org/10.14710/interaksi.7.2.79-86>
- Haoxing, Z., & System, C. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Harkrisnowo, H. (2003). dalam Perspektif Sosio-Yuridis. *Kriminologi Indonesia*, 3(11), 157–170.
- Jamaluddin, V. W. (2019). Peran Perempuan Dan Relasi Gender Dalam Film Ayat-Ayat Cinta 2 (Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills. *Jurnal Sains Riset*, 9(2), 58–64. <https://doi.org/10.47647/jsr.v9i2.115>
- Li, X., Yu, J., Jaroniec, M., Chen, X., & Ματινα. (2019). No TitleEAENH. *Chemical Reviews*, 8(5), 55. Merli, P. (2010). Antonio Gramsci, Prison notebooks. *International Journal of Cultural Policy*, 16(1), 53–55. <https://doi.org/10.1080/10286630902971603>
- Morrison, E. W., & Milliken, F. J. (2000). Organizational silence: A barrier to change and development in a pluralistic world. *Academy of Management Review*, 25(4), 706–725. <https://doi.org/10.5465/AMR.2000.3707697>
- Olofsson, A. D., Fransson, G., & Lindberg, J. O. (2020). A study of the use of digital technology and its conditions with a view to understanding what ‘adequate digital competence’ may mean in a national policy initiative. *Educational Studies*, 46(6), 727–743. <https://doi.org/10.1080/03055698.2019.1651694>
- Shiddiq, A. (2015). TRADISI AKADEMIK PESANTREN Ahmad Shiddiq. *Tadris, Jurnal Pendidikan Islalm*, 10(2), 219–229.
- Sitompul, A. G. M., & Munandar, T. I. (2020). PAMPAS : Journal Of Criminal Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 31–44.
- Terry, K. J. (2008). Stained glass: The nature and scope of child sexual abuse in the catholic church. *Criminal Justice and Behavior*, 35(5), 549–569. <https://doi.org/10.1177/0093854808314339>